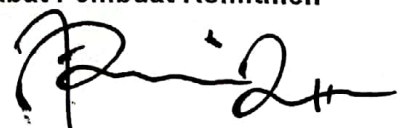


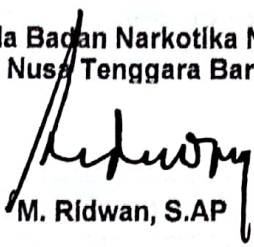
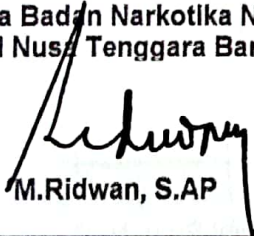
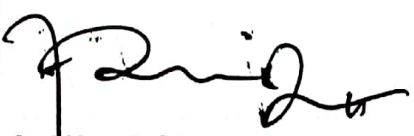
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag NRP. 66120711	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. IV - c b. Penyidik BNN Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat BNNK Sumbawa	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Udara	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Sumbawa	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 07 November 2024 c. 08 November 2024	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.QDB.001.052.B.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram
tanggal : 6 November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Sumbawa Pada Tanggal : 07 November 2024 Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  M. Ridwan, S.AP
II. Tiba di : Kab. Sumbawa Pada Tanggal : 07 November 2024	Berangkat dari : Kab. Sumbawa Ke : Mataram Pada Tanggal : 08 November 2024
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 08 November 2024 Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  M. Ridwan, S.AP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fairul Husni, SE</u>
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	